

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Industri pertahanan dan ekonomi suatu bangsa saling bertaut erat. Kesimpulan ini yang muncul jika membayangkan Indonesia memiliki industri pertahanan yang kuat. Syaratnya? Industri pertahanan yang mumpuni tercapai ketika Indonesia sudah menjadi negara dengan ekonomi kuat.

Melihat dari beberapa riset yang dikeluarkan lembaga dan ekonomi dunia seperti Standard Chartered Research, International Monetary Fund (IMF), City Investment Research and Analysis, lembaga kajian VOX (tentang Global Growth Generators), dan Jim O'Neill, ekonom Goldman Sachs, yang menunjukkan Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi baru beberapa tahun mendatang, dengan meningkatkan anggaran pertahanan, maka seyogianya Indonesia memiliki potensi besar unyuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Potensi besar yang dimiliki Indonesia ini, dengan demikian, harus dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk dalam mendorong industri pertahanan dalam negeri. Sebagai sebuah cita-cita, keinginan mewujudkan Indonesia memiliki industri pertahanan yang-kuat yang mampu meningkatkan sistem pertahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi-bukanlah hal yang mustahil diwujudkan (Karim 2014, hlm.2).

Sebagaimana pengalaman negara-negara lain, kemampuan dalam industri pertahanan biasanya menjadi salah satu ciri negara-negara yang maju secara ekonomi. Negara-negara kuat di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Prancis adalah contoh negara yang memiliki industri pertahanan yang maju. Kuatnya industri pertahanan yang mereka miliki juga mencerminkan kekuatan ekonomi yang mereka punya.

Bagi negara seperti Indonesia, kemandirian industri pertahanan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa masih menjadi cita-cita besar. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini, penguatan dalam sistem pertahanan negara lebih banyak didukung oleh pasokan alat peralatan dan keamanan

(alpalhankam) dari luar negeri. Memang, sebagai negara berkembang yang setiap hari harus bergelut dengan isu pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, pendidikan, atau kesehatan, isu kemandirian industri pertahanan pada saat ini masih kalah menarik. Namun isu dan gagasan untuk mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan tidak bisa diabaikan dan dibelenggu. Kegagalan mewujudkan industri pertahanan akan membawa dampak-dampak negatif lain, seperti besarnya anggaran yang harus digunakan untuk membeli peralatan dari negara lain, terhambatnya potensi pertumbuhan ekonomi yang muncul dalam industri pertahanan dalam negeri, serta ketergantungan alpalhankam dari luar negeri yang membuat terdeteksinya kekuatan pertahanan yang kita miliki (Karim 2014, hlm.4).

Untuk mewujudkan terciptanya kemandirian dalam industri pertahanan, dibutuhkan skema dan rencana strategis yang matang. Berbagai potensi, baik dalam maupun luar negeri, harus dipetakan dengan baik. Kita juga tidak bisa mengabaikan berbagai persoalan dan sejarah dalam sistem pertahanan yang kita miliki sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pasti, kemandirian industri pertahanan ini harus menjadi bagian dari sistem pertahanan yang dicita-citakan Indonesia ke depan.

Salah satu strategi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanannya adalah dengan membuat dan mengimplementasikan Undang-Undang (UU) tentang industri pertahanan, yang di dalam juga terdapat tentang alih teknologi untuk bisa diimplementasikan industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Indonesia telah memiliki UU No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Indonesia banyak belajar dari negara lain mengenai alih teknologi atau transfer teknologi. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk sebuah negara menciptakan kemandirian industri pertahanannya. Seperti negara Tiongkok yang diberikan alih teknologinya dari Rusia yang membuat Tiongkok meningkat dalam militernya khususnya industri pertahanannya.

Hal tersebut yang menjadikan Indonesia untuk mengikuti jejak Tiongkok dan negara lain yang melakukan transfer teknologi untuk menciptakan kemandirian industri pertahanannya. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang dikenal dengan “bebas-aktif”. Hal ini yang membuat Indonesia tidak

memihak antara kawasan atau negara tertentu dalam bekerjasama. Pemilihan Tiongkok dalam hal kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya di bidang industri pertahanan menjadi pertimbangan yang cukup matang. Ditambah, faktor tentang embargo militer, sejak tahun 1990-an Amerika Serikat (AS) menerapkan embargo militer terhadap Indonesia. Akibatnya, kapabilitas persenjataan Indonesia menurun karena faktor usia peralatan, suku cadang yang kian menipis serta sudah jauh ketinggalan zaman dan teknologi, pelaksanaan embargo militer AS tersebut mengakibatkan adanya *technological imperative* bagi Indonesia. Artinya, kemajuan teknologi khususnya di bidang militer juga dapat menjadi faktor independen mendasar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan suatu negara.

Hubungan Indonesia – China yang sekarang Indonesia sebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki akar sejarah yang panjang, hubungan yang dapat ditelusuri sampai abad-abad pertama Masehi. Interaksi antara nenek moyang bangsa Tiongkok dengan nenek moyang bangsa Indonesia telah dimulai sejak 2000 tahun lalu. Pada 13 April 1950, Republik Rakyat Tiongkok menggalang hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Hubungan diplomatik RI-RRT dimulai pada 13 April 1950, dibekukan pada 30 Oktober 1967, kemudian dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya *MoU on the Resumption of Diplomatic Relations* Indonesia-Tiongkok di Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 1990 (Catatan Peristiwa Penting Dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia 2009, hlm.1). Dalam bidang pertahanan Indonesia dan Tiongkok pun sudah mulai melakukan penandatanganan yaitu pada Kemitraan Strategis tahun 2005, kemudian Persetujuan Aktivitas Bersama dalam Bidang Pertahanan tahun 2007 dan terakhir yang ingin penulis teliti yaitu tahun 2011 tentang MoU Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Tiongkok.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, hubungan kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan pertahanan Indonesia dalam kemandirian Industri Pertahanan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia yang memiliki letak geografis yang dikelilingi oleh banyak negara, maka Indonesia berupaya untuk melindungi pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara luar ataupun ancaman dari luar. Peningkatan kerjasama pertahanan

dan keamanan antara Indonesia dan Tiongkok terjadi peningkatan dalam bidang industri pertahanan yang terjadi pada tahun 2011. Dalam kerjasama tersebut terdapat kesepakatan untuk alih teknologi di bidang peluru kendali (rudal) dengan tipe C-705 buatan Tiongkok.

Pemilihan Tiongkok oleh Indonesia bukan sekedar asal memilih sebagai mitra kerjasama dalam bidang rudal ini. Karena peluru kendali merupakan alutsista yang terbilang sensitif jika sebuah negara memilikinya dan memerlukan teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan peluru kendali tersebut. Kemudian peluru kendali atau rudal merupakan salah satu dari tujuh alutsista yang merupakan termasuk skema dalam pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) 2024 (Karim 2014, hlm.390). Pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerjasama peluru kendali ini melalui banyak pertimbangan, karena banyak negara lain selain Tiongkok yang memiliki Industri Pertahanan yang menciptakan peluru kendali seperti Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan lain-lain. Pertimbangan tersebut antara lain dilihat dari kemampuan rudal-rudal negara produsen, spesifikasi rudal, biaya rudal tersebut, dan juga kegunaan rudal tersebut sesuai kondisi wilayah negara konsumen (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Pimpinan Proyek Pengembangan Rudal C-705 oleh Kolonel Laut Taufik Arif, tanggal 1 April 2015 di Koarmabar, Jakarta).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menegaskan hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin intens dalam kerjasama di bidang industri pertahanan. Salah satunya adalah kegiatan pengadaan alutsista berupa misil rudal. Menurut Purnomo, TNI terutama Angkatan Laut sudah merasa cocok dengan rudal buatan Tiongkok.

“Pas latihan gabungan di Jawa Timur. Saya sendiri hadir melihat kemampuan rudal China tersebut. Dari temen-temen di TNI terutama Angkatan Laut itu merasa pas dan cocok dengan rudal-rudal China. Dari segi kualitas dan cost,” ujar Purnomo di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (24/7/2014). Purnomo menambahkan untuk misil Rudal, pihaknya serius terkait kerjasama pengadaan alutsista ini (Menhan: TNI Cocok dengan Rudal China 2014, p.1).

Kerjasama Indonesia dan Tiongkok ini adalah kerjasama industri pertahanan tahun 2011. Pada tanggal 22 Maret 2011, Kementerian Pertahanan RI dan *State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence of the People's Republic of China on Defence Industry Cooperation*. (SASTIND) sepakat meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan kedua negara. Hal tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala SASTIND, Chen Qiufa di Jakarta (RI-Tiongkok Perkuat Kerjasama Pertahanan 2014,p.1) .



Sumber : Kementerian Pertahanan, 2011

Gambar 1 Penandatanganan MoU Kerjasama Industri Pertahanan RI-RRC Tahun 2011

Ruang lingkup kerjasama :

- a. Pengadaan peralatan militer di bidang-bidang tertentu yang disepakati dengan dasar Pemerintah-ke-pemerintah.
- b. Transfer teknologi peralatan militer tertentu mungkin mencakup namun tidak terbatas pada perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan.
- c. Kerjasama produksi bersama peralatan militer tertentu
- d. Pengembangan bersama peralatan militer tertentu dan
- e. Pemasaran bersama militer tertentu dalam dan atau di luar negara masing-masing.

Salah satunya isi dari program tersebut adalah pengembangan bersama rudal C-705 yang terlampir dalam *Letter of Intent* (LoI). Sosok rudal ini masih terbilang baru, pertama kali dimunculkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu. Hingga kini, sumber informasi tentang spesifikasi teknis pada rudal ini masih terbatas, yang jelas C-705 dirancang sebagai rudal yang menawarkan efisiensi dalam operasionalnya. Secara umum bisa dikatakan spesifikasinya berada diatas C-704, tapi masih dibawah C-802 (C-705 : Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI-AL 2011, hlm.1).

C-705 mempunyai jangkauan tembak antara 75-80 Km tanpa roket booster, sedangkan bila ditambahkan roket booster jangkauan bisa terdongkrak hingga 170 Km. Dilihat dari jangkauannya, C-705 bisa disebut pula sebagai rudal lintas cakrawala (*over the horizon*). Untuk urusan kecepatan, meski tak diketahui persis informasi kecepatan luncurnya, banyak disebutkan C-705 masuk dalam kategori rudal *high sub sonic*. Tentang bobot rudal juga tak ada keterangan pasti, tapi bobot hulu ledak rudal ini mencapai 110 Kg HVDT-H high explosive, lebih ringan ketimbang hulu ledak C-802, yang 165 Kg High Explosive (C-705 : Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI-AL 2011, hlm.1).



Sumber : Indomiliter.com, 2011

Gambar 2 Rudal C-705

Dalam perencanaan strategisnya Indonesia dalam hal pembelian dan ahli teknologi rudal anti kapal ini akan dipasangkan di KCR (Kapal Cepat Rudal) tipe 40 atau sejenis kapal patroli yang dimiliki TNI-AL. Rudal ini akan dipasangkan diantaranya KCR Clurit (641), tak lain adalah kapal perang buatan dalam negeri yang pertama kali dibangun di PT. Palindo Marine, Batam (C-705 : Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI-AL 2011,p.1).



Sumber : Indomiliter.com, 2011

Gambar 3 Tampilan buritan KRI Clurit, tampak 2 unit tabung peluncur C-705

Menyinggung mengenai kerja sama pembuatan rudal dengan Tiongkok, Sjafrie mengatakan Kemhan akan melakukan secara bertahap melalui transfer teknologi dan produksi bersama sampai nantinya Indonesia bisa mencapai kemandirian. Wakil Menteri Pertahanan juga mengatakan, pembelian alutsista dari Tiongkok, termasuk rudal anti kapal, akan diikuti dengan tahapan transfer teknologi serta proses produksi bersama. Peluru kendali ini dipakai untuk perlengkapan persenjataan kapal perang TNI Angkatan Laut.

‘Di samping kita beli, kita juga harus mengantisipasi dengan *joint production*’, tegasnya (Wamenhan Akan Buat C-705 Secara Bertahap 2010,p.1).

I.2 Rumusan Masalah

Undang Undang RI Nomer 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, memiliki aturan yang harus dipenuhi dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, termasuk perihal: transfer teknologi, perdagangan (imbal dagang, kandungan lokal) serta pembelian lisensi untuk senjata teknologi tinggi dan medium. Semua aturan itu harus jelas, sebelum kesepakatan dilakukan.

Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang pertahanan dan keamanan tahun 2011 memiliki ruang lingkup atau program yang tertera di atas. Diantaranya alih teknologi bidang industri pertahanan salah satunya di bidang rudal. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan “Bagaimana Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok periode 2011-2014?”

I.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian dalam mengambil judul ini, yaitu :

- a. Untuk memahami terjadinya kerjasama industri pertahanan Indonesia – Tiongkok.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang membuat Indonesia ingin kerjasama dengan Tiongkok terkait rudal.
- c. Untuk menganalisa hal-hal bagaimana implementasi program kerjasama Indonesia-Tiongkok tahun 2011.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis Secara Akademik, untuk memahami kerjasama industri pertahanan Indonesia pada khususnya, dalam hal ini kerjasama industri pertahanan Indonesia – Tiongkok. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang membuat Indonesia memilih Tiongkok dalam kerjasama kali ini. Ditambah melihat bagaimana implementasi MoU program kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok tahun 2011-2014.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Artikel Yanyan Mochamad Yani, 2010, Makna Strategis Kerjasama Militer Indonesia – Tiongkok.

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok kini makin erat. Beberapa waktu lalu kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang merupakan ejawantah dari Deklarasi Bersama yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok pada tanggal 25 April 2005 dalam rangka membangun kemitraan strategis (Makna Strategis Kerjasama Militer Indonesia-Tiongkok 2010, p.1-5).

Secara khusus, nota kesepakatan kerjasama militer Indonesia dan Tiongkok antara lain meliputi pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan industri di bidang militer. Dengan kata lain, payung kerjasama ini sepakat untuk melakukan pendidikan dan latihan militer bersama; pengembangan industri militer dan intelijen; pertukaran teknologi dan bantuan teknis; serta produksi peralatan militer bersama.

Pertanyaannya kini adalah apa makna strategis dari upaya peningkatan kerjasama militer Indonesia dan Tiongkok?. Faktor-faktor apa yang diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan tersebut? Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan membatasi diri dari perspektif faktor strategis Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik dan implikasinya bagi Indonesia.

Kawasan Asia-Pasifik menempati prioritas tertinggi sebab negara-negara kunci yang terlibat langsung dengan kepentingan Tiongkok yakni Rusia, Amerika

Serikat, dan Jepang, secara geografis terletak di kawasan ini. Dalam kacamata politik internasional Tiongkok sudah eksis sebagai salah satu negara besar (*major power*) yang sangat berpengaruh dalam menyuarakan kepentingan Dunia Ketiga di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bidang ekonomi dengan program modernisasi “lompatan jauh ke depan” yang dirintis oleh Deng Xiaoping sejak awal tahun 1980-an, Tiongkok telah menunjukkan sebagai kekuatan ekonomi dunia yang diproyeksikan akan mengalahkan Amerika Serikat di tahun 2020.

Sedangkan di bidang pembangunan militer Tiongkok masih terus berupaya untuk dapat sejajar dengan AS dan Rusia. Dewasa ini Tiongkok sudah dapat membuktikan bahwa kekuatan militernya sudah meningkat lagi melalui keberhasilan uji coba senjata anti satelit baru-baru ini. Itu berarti penguasaan teknologi perang ruang angkasa Tiongkok sudah sejajar dengan AS dan Rusia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki potensi besar dalam pembangunan sistem keamanan di Asia-Pasifik yang tidak hanya memainkan peran penting dalam menentukan pola-pola realiansi di kawasan, tetapi juga memiliki insentif kuat untuk memainkan politik perimbangan kekuatan di kawasan. Perilaku Tiongkok sebagai sebuah entitas negara bangsa di Asia-Pasifik sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal terutama sikap dan kebijakan Amerika Serikat dan Jepang baik secara individu maupun gabungan. Dengan kata lain secara hipotetis faktor Tiongkok dalam hubungan segitiga AS-Jepang-Tiongkok akan menentukan lingkungan politik, keamanan dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Kalkulasi kondisi lingkungan strategis di atas dikaji jeli oleh elit militer Indonesia. Hal itu terlihat hanya dalam hitungan kurang lebih satu tahun setelah Deklarasi Bersama Indonesia dan Tiongkok untuk membangun kemitraan strategis, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama militer di bidang pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan industri di bidang militer. Peluang ini oleh Indonesia tampaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas militer Indonesia. Kita mafhum bahwa sejak tahun 1990an AS menerapkan embargo militer terhadap Indonesia. Akibatnya, kapabilitas persenjataan Indonesia menurun karena faktor usia peralatan, suku

cadang yang kian menipis serta sudah jauh ketinggalan jaman dan teknologi. Jika merujuk pada pendapat pakar Barry Buzan dalam bukunya *An Introduction to Strategic Studies*, pelaksanaan embargo militer AS tersebut mengakibatkan adanya *technological imperative* bagi Indonesia. Artinya, kemajuan teknologi khususnya di bidang militer juga dapat menjadi faktor independen mendasar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan suatu negara.

Maka itu tidak mengherankan apabila Indonesia berupaya keras untuk lebih instensif membangun bentuk hubungan yang lebih kokoh dengan negara selain AS, dan meninggalkan pola ketergantungan Indonesia pada AS khususnya dalam bidang pertahanan-keamanan. Akhirnya, sejak awal era reformasi untuk memenuhi kebutuhan vital peralatan militernya, Indonesia secara tegas berpaling ke negara lain, termasuk Tiongkok. Maka itu pemberdayaan dan pemaksimalan kerjasama militer Indonesia dengan China merupakan pilihan cerdas yang perlu disinambungkan terus oleh elit militer Indonesia. Tinggal kini satu hal krusial yang perlu dilakukan adalah koordinasi sinergis antar institusi pemerintah yang berkaitan dengan upaya pembangunan kekuatan militer Indonesia, terutama Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, yang dibarengi oleh dukungan politis penuh dari pihak institusi legislatif. Dukungan domestik yang kuat dan solid bagi peningkatan kekuatan militer Indonesia adalah mutlak diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Diharapkan pada akhirnya nanti peningkatan kekuatan militer Indonesia secara signifikan akan mengubah posisi strategis Indonesia serta menentukan pola hubungan antar negara di kawasan Asia-Pasifik.

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah bahwa penelitian di atas menjelaskan tentang kerjasama militer antara Indonesia dan Tiongkok tanpa melihat reaksi atau respon negara lain di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan penulis melihat bahwa kerjasama militer Indonesia dan Tiongkok khususnya dalam pembelian alutsista mempengaruhi situasi keamanan di kawasan di Asia Pasifik.

I.5.2 Laporan Kemajuan Term I Peningkatan Kemampuan Peneliti Dan Perekayasa (Pkpp) Tahun 2012.

Pada laporan ini dimana memfokuskan kebijakan Indonesia dalam mengembangkan rudal tanpa masuk kedalam rejim MCTR yang merupakan kumpulan-kumpulan negara yang mengembangkan rudal/peroketan dengan melakukan *Transfer of Technology* sehingga mendapatkan kemandirian di masa mendatang, dalam jurnal ini juga menjelaskan tiap-tiap negara yang merupakan anggota MTCR maupun non-anggota MTCR yang mengembangkan rudal/peroketan nasional serta memberikan penjelasan mengenai motivasi setiap negara yang telah mengembangkan rudal nasionalnya. Indonesia yang merupakan non anggota MTCR mendapatkan hambatan, dalam jurnal ini dijelaskan dengan posisi Indonesia yang bukan anggota sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan *Transfer of Technology* dari negara-negara yang telah dulu mengembangkan program rudalnya. Namun Indonesia memiliki peluang lain yakni dengan adanya Tiongkok dan India yang juga bukan anggota dari MTCR membuat Indonesia memiliki harapan akan terjadinya proses *Transfer of Technology* untuk dapat mengembangkan program rudalnya sehingga mampu mencapai kemandirian di masa depan (Baskara 2012, hlm.1-5)

Perbedaan dengan penelitian yang penulis ambil adalah dimana lebih fokus kepada proses terjadinya *Transfer of Techonology (ToT)* dengan Tiongkok terkait pengembangan rudal C-705 anti kapal yang dimiliki Tiongkok dan hal ini diharapkan mampu menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam membangun kemandirian di bidang industri pertahanan khususnya pada sektor rudal, sehingga menjadi peningkatan kekuatan bagi Indonesia sendiri, rudal peluru kendali ini memiliki jangkauan jelajah 170m , yang telah dinilai sesuai dengan kebutuhan TNI AL yang dipasangkan di Kapal Cepat Rudal (KCR). Fokus penulis lebih kedalam kerjasama Indonesia-China dalam melakukan (ToT) untuk pengadaan rudal peluru kendali C-705.

I.5.3 Artikel dari Robert Hewson yang berjudul Chinese Anti-Ship missile System 2010.

Dalam pembahasan jurnal oleh Robert Hewson menyebutkan bahwa China telah lahir sebagai negara pesaing bagi AS, dengan melihat laju ekonomi dan anggaran yang dikeluarkan untuk penelitian pada bidang rudal anti kapal. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan menunjukkan bahwa pentingnya setiap angka yang dikeluarkan Tiongkok untuk mengembangkan penelitiannya di bidang rudal, sehingga Tiongkok menuju kearah kemandirian industri di bidang pertahanan yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui penelitian dan teknologi yang meningkat Tiongkok meningkatkan pertahanan di sektor laut untuk tetap menjaga kedaulatan bangsanya sehingga Tiongkok memerlukan sebuah strategi dalam menjaga wilayah lautnya, dengan tersedianya sistem pertahanan laut modern yang dapat digunakan dalam segala cuaca, indikasi sasaran, komunikasi, pengambilan keputusan, serangan cepat dan evaluasi fektoroperasional. Sehingga munculnya kemampuan export china dalam rudal-rudal telah dibuat seperti C-701, C-704, C-705, C-802A, C-602 yang mampu ditempatkan di darat, laut, maupun udara (Hewson 2010, p.1-3).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat ialah dimana jurnal berfokus pada kemampuan Tiongkok dalam pengembangan dalam negerinya di sektor rudal anti kapal dan pengembangan komponen-komponen yang mendukung kinerja rudal sehingga mampu dioperasikan dengan baik sehingga memunculkan perkembangan di sektor industri pertahanan yang juga menjadi pasar tersendiri bagi Tiongkok untuk dapat mengekspor rudal-rudalnya ke negara sahabat, seperti Iran. Sedangkan penelitian penulis yakni Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam pengembangan rudal C-705 milik Tiongkok sehingga dilakukannya *Transfer of Technology* yang nantinya akan memajukan pengembangan rudal dalam negeri bagi Indonesia, yang dalam pemenuhan kebutuhan bagi TNI-AL rudal tipe peluru kendali ini sangat dibutuhkan sehingga mampu menjaga wilayah perairan Indonesia yang luas yang dimana rudal ini mampu dikontrol dari ruang kendali/pusat melalui sistem komputer.

I.5.4 Skripsi Sorang Afril Srihayati Saragih, Universitas Indonesia “Dinamika Transfer Persenjataan China dari Rusia Periode 2006- 2010: Analisa Intensi China dari Isu Industri dan Isu Transfer Teknologi”

Dalam pembahasan skripsi ini adalah temuan penulis bahwa nilai transfer persenjataan Tiongkok dari Rusia pada periode 2006-2010 terus menerus menurun di kala Tiongkok masih berusaha meningkatkan kapabilitas tersebut mencapai angka terbesar pada tahun 2005. Hal inilah yang menjadi pusat kajian skripsi ini. peneliti melihat adanya kejanggalan yang terlihat dari turunnya anggaran pertahanan Tiongkok untuk mengimpor alutsistanya dari Rusia dan Barat (Saragih 2012, hlm.23-35).

Tiongkok mampu mengintegrasikan alutsistanya atau *upgrade* beberapa alutsista yang dibelinya dari Rusia ataupun Barat meskipun kemampuannya masih belum sama kapabilitas dari negara produsen seperti Rusia. Hal ini dikarenakan Tiongkok sudah memiliki teknologi persenjataan tersebut yang pernah diperolehnya dari Uni Soviet dan Barat.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat ialah skripsi ini membahas tentang transfer senjata yang dilakukan Tiongkok dari Rusia dan Barat membuat Tiongkok bukan menjadi ketergantungan namun justru Tiongkok menurunkan anggaran pertahanan untuk pembelian senjata dari luar. Mereka mampu belajar dari teknologi yang diberikan Uni Soviet dari segi persenjataan. Kemudian Tiongkok mampu *upgrade* senjata tersebut. Hal ini yang bisa dilakukan pula oleh Indonesia yang akan bekerjasama dengan Tiongkok yang sudah mampu memproduksi senjatanya. Diharapkan dalam proses transfer teknologi persenjataan khususnya rudal C-705, Indonesia nantinya akan mampu membuat rudal ini dan mampu *upgrade* rudal rudal yang ada di Indonesia. Dan nantinya pula tujuannya dari itu semua Indonesia juga bisa sejajar dengan negara lain yang mampu memproduksi dan menjual ke negara lain.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada masa pasca Perang Dingin, muncul teori-teori keamanan baru yang lebih bernuansa makna keamanan kepada isu-isu non-konvensional dan

pentingnya forum-forum dialog yang membahas masalah keamanan baik ditingkat regional maupun internasional. Maka, pada masa pasca Perang Dingin tersebut berkembang teori-teori keamanan yang bertumpu pada (Dewitt 1994, hlm.4) :

1.6.1 Common Security

Prinsip dasar pelaksanaan *common security* yaitu seluruh negara bangsa memiliki hak yang legal dan sama untuk memperoleh jaminan keamanan, kapabilitas militer bukan instrumen yang sah untuk menyelesaikan konflik, kemampuan untuk menahan diri terhadap aksi-aksi yang membahayakan keamanan negara lain sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan keamanan nasional, keamanan tidak dapat diatasi dengan hanya melalui superioritas militer, pengurangan dan pembatasan secara kualitatif kapabilitas militer sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian keamanan bersama, dan upaya mengkaitkan antara peristiwa politis dan negosiasi persenjataan perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya konflik terbuka. Strategi keamanan yang dapat ditempuh oleh konsep ini adalah *non-proactive defence* dan *non-offensive policy*, strategi ini bertujuan mengurangi dilema keamanan dengan jalan mengembangkan persenjataan semata-mata untuk kepentingan pertahanan bukan untuk mengancam negara lain.

1.6.2 Konsep Cooperative Security

Konsep ini menlandaskan diri pada antisipasi ancaman (terutama eksternal) dengan jalan merangkul pihak lawan atau pihak yang dianggap mengancam. Namun konsep *cooperative security* tersebut lebih merujuk pada pendekatan yang umum dalam mengembangkan institusi yang bersifat multilateral. Terutama adanya interdependensi dalam masalah keamanan terutama pada tingkat kawasan. Dampak dari interdependensi tersebut adalah penciptaan kondisi keamanan yang justru harus dilakukan dengan mengajak pihak yang dianggap mengancam (lawan) untuk bekerjasama dalam penciptaan stabilitas keamanan bersama di kawasan. Kebijakan keluar yang diharapkan lebih berupa keinginan untuk menciptakan intensitas diplomasi dialog keamanan dua jalur (*two track diplomacy*), dalam arti juga melibatkan peran aktor non-negara. Pembahasan

bersifat militer maupun non militer namun penekanannya adalah pada pembahasan satu isu dalam setiap pertemuan melalui institusi multilateral.

Dalam konsep ini menekankan upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal-institusional (Perwita 2011, hlm.219). Dalam konsep ini berusaha untuk merubah perilaku negara yang perilakunya selalu berkompetisi dengan negara lain demi mencapai kepentingan negaranya, tetapi konsep ini menawarkan setiap negara untuk berubah dengan menjalin kerjasama dengan negara lain serta membangun rasa saling percaya diantara keduanya. Pendekatan ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia khususnya pada awal 1990-an dalam upaya mencari format baru dalam pengelolaan keamanan kawasan untuk menjawab perubahan-perubahan kondisi keamanan internasional sebagai dampak dari runtuhnya sistem bipolar dan bubarnya salah satu negara adidaya Uni Soviet. Hal ini disampaikan dalam pidato pada pertemuan para Menteri ASEAN pada tahun 1993. Hal ini dikarenakan pada masa Perang Dingin muncul harapan untuk lebih mengelola kondisi keamanan tidak hanya sebatas mengantisipasi terjadinya perang, namun bagaimana membangun nilai-nilai bersama secara internasional untuk mencapai stabilitas perdamaian jangka panjang (Synder 1999, hlm.113-116).

Masuk kepada fokus penelitian yang penulis teliti, konsep ini berguna guna dapat melihat bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok terkait produksi bersama industri pertahanan dalam bidang peluru kendali khususnya rudal C-705, sangatlah berguna untuk dapat menjaga keamanan regional masing-masing, serta dapat membangun rasa percaya antar kedua negara melalui pencegahan terhadap konflik antarnegara dan mempertahankan *status quo* antar negara.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

- a. **Jenis Penelitian:** Jenis penelitian ini dilakukan adalah deskriptif dan menggunakan model analitis, karena penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana “Bagaimana Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok Tahun 2011-2014”.
- b. **Jenis Data:** Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Untuk sumber primer adalah hasil wawancara terhadap narasumber yang memang mengikuti kerjasama industri pertahanan ini seperti instansi Kementerian Pertahanan. Untuk sumber sekunder didapat melalui hasil riset sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan laporan-laporan resmi dari lembaga pemerintahan.
- c. **Teknik Pengumpulan Data:** Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi Kepustakaan (literature) dengan mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat, seperti perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, studi kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari kembali teori-teori hubungan Internasional yang di pelajari selama perkuliahan.

1.9 Sistematika Pembabakan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membagi isi penelitian menjadi 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembabakan.

BAB II INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DAN DINAMIKA KERJASAMA PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA – TIONGKOK HINGGA TERCAPAINYA *MOU* KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN 2011

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah dan permasalahan rudal atau roket di Indonesia. Bagaimana Indonesia memilih Negara Tiongkok di bidang industri pertahanan dalam memenuhi alutsista TNI dalam hal ini rudal sebagai alat atau komponen pertahanan negara. Kemudian Dinamika kerjasama Indonesia dan Tiongkok di bidang pertahanan dan keamanan.

BAB III IMPLEMENTASI KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA – TIONGKOK TAHUN 2011

Bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok Tahun 2011.

BAB IV PENUTUP

Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN